BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Yang Melakukan Mogok Kerja

Pada Bab sebelumnya dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mengetengahkan sebuah hipotesis yang coba diangkat dalam peneltian ini, yaitu berupa adanya tindakan balasan yang dilakukan oleh Pengusaha PT. MUGAI INDONESIA terhadap Pekerja nya yang melakukan mogok kerja, dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja. ★

Objek inilah yang nanti akan di elaborasi dan di analsis oleh penulis, tentunya dengan juga mengetengahkan data-data primer dan penunjangnya sehingga sampai suatu kesimpulan ilmiah yang bisa menjawab tentang bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang melakukan mogok kerja dari tindakan balasan Pengusaha, dan bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana bagi Pengusaha yang melakukan tindakan balasan terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja.

Penulis juga akan memberikan kesimpulan apakah memang benar PT. MUGAI INDONESIA diduga telah melakukan tindakan balasan balasan terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja yang terqualifikasi sebagai tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *junto* Pasal 81 angka (65) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

B. Penyebab Terjadinya Mogok Kerja

Penulis telah melakukan wawancara dengan salah seorang responden bernama Iyan Suryana yang merupakan Ketua Serikat Pekerja PT. MUGAI INDONESIA. Penulis menanyakan kepada responden: “Dapatkah saudara menjelaskan kapan terjadinya mogok kerja dan apa yang menjadi penyebab pekerja melakukan mogok kerja? Saudara Iyan Suryana menjawab: “Para Pekerja PT. MUGAI INDONESIA melakukan mogok kerja selama 4 (empat) hari, yaitu pada tanggal 09, 10, 13 dan 14 Januari 2020, dan mogok itu dikarenakan gagalnya perundingan yang membahas tentang masalah dispensasi untuk kegiatan serikat pekerja dalam area perusahaan”. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan perwakilan pekerja yang melakukan mogok kerja tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi penyebab atau alasan mengapa pekerja melakukan mogok kerja adalah karena persoalan materi perundingan yaitu berupa pengaturan masalah dispensasi untuk pengurus atau anggota serikat pekerja PT. MUGAI INDONESIA yang akan menjalankan kegiatan organisasi serikat pekerja di area internal Perusahaan.¹

C. Kronologi Terjadinya Mogok Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja

Saat penulis melakukan wawancara dengan salah satu responden pekerja yang melakukan mogok kerja, maka penulis menanyakan perihal kronologi terjadinya mogok kerja dan pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh para pekerja.. Menurut keterangan responden tersebut, yaitu saudara Iyan Suryana, saat penulis menanyakan kepada saudara Iyan Suryana, “Dapatkah saudara terangkan

¹ Hasil wawancara dengan saudara Iyan Suryana, Ketua Serikat Pekerja PT. MUGAI INDONESIA pada tanggal 03 Agustus 2021

bagaimanakah sebenarnya kronologi terjadinya mogok kerja dan kronologi terjadinya pemutusan hubungan kerja yang saudara alami dan rekan-rekan yang lain? Maka saudara Iyan Suryana pun menjelaskan kronologi tersebut yang diuraikan sebagai berikut:²

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2019 terjadi Bipartit ke I (pertama) di Meeting Room lantai 2 (dua) PT. MUGAI INDONESIA dengan aktifitas:

- Pembahasan Tata tertib perundingan terkait dispensasi Pengurus dan anggota PUK SPAMK FSPMI PT. MUGAI INDONESIA;
- Perusahaan memberikan draft terkait dispensasi dan fasilitas Serikat Pekerja.

2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 terjadi Bipartit ke II (kedua) di Meeting Room lantai 2 (dua) PT. MUGAI INDONESIA dengan aktifitas:

- Tanggapan PUK SPAMK FSPMI PT. MUGAI INDONESIA atas draft dari perusahaan terkait dispensasi;
- Kesepakatan perundingan diperpanjang sampai dengan 31 oktober 2019.

3. Bahwa pada tanggal 08 November 2019 terjadi Bipartit ke III (ketiga) di Meeting Room lantai 2 (dua) PT. MUGAI INDONESIA dengan aktifitas:

- Pemberian draft dari PUK SPAMK FSPMI PT. MUGAI INDONESIA terkait dispensasi.

² Hasil wawancara dengan saudara Muji Raharjo, Ketua Serikat Pekerja PT. MUGAI INDONESIA pada tanggal 03 Agustus 2021

4. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 terjadi Bipartit ke IV (keempat) di Meeting Room lantai 2 (dua) PT. MUGAI INDONESIA dengan menghasilkan:
- Belum ada kesepakatan terkait dispensasi;
 - Pihak Perusahaan mengajukan perundingan antara Serikat Pekerja dan Pengusaha dilanjutkan pada bulan Januari 2020.
5. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 terjadi pertemuan antara PC SPAMK FSPMI Kabupaten Karawang, PUK SPAMK FSPMI PT. MUGAI INDONESIA, Manajemen PT. MUGAI INDONESIA, dan perwakilan DPK APINDO Karawang (H. Abdul Syukur) di RM. Lebak Sari Indah (tidak ada notulen) dengan menghasilkan:
- Belum ada kesepakatan terkait dispensasi;
 - Perundingan dilanjutkan pada tanggal 20 Desember 2019 antara Serikat Pekerja dan Pengusaha.
6. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 terjadi Bipartit ke V (kelima) di Meeting Room lantai 2 (dua) PT. MUGAI INDONESIA dengan menghasilkan:
- Perundingan mengalami kegagalan/jalan buntu (*Deadlock*)
7. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 PUK SPAMK FSPMI PT. MUGAI INDONESIA mengirimkan surat pemberitahuan Mogok Kerja kepada Perusahaan dan pihak-pihak terkait dengan nomor surat: **066/PUK SPAMK-FSPMI/PT.MGI/XII/2019;**

8. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2020, PT. MUGAI INDONESIA mengajukan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial tentang dispensasi kepada DISNAKERTRANS Kabupaten Karawang dengan nomor surat: **001/HRD-GA/MGI/I/2020**;
9. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2020 Perusahaan mengirimkan surat tanggapan atas surat pemberitahuan Mogok Kerja yang dilayangkan Serikat Pekerja dengan nomor surat: **01/HRD&GA-MGI/1/2020**;
10. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2020 dimulai Mogok Kerja;
11. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2020 Perusahaan menggantikan pekerja yang melakukan mogok dengan Pelajar yang sedang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Perusahaan juga melakukan rekrutmen pekerja baru untuk menggantikan pekerja yang melakukan mogok kerja;
12. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2020 pihak Perusahaan mengirimkan surat panggilan ke 1 (satu) kepada pekerja yang mogok kerja;
13. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 fasilitator dari DISNAKERTRANS Kabupaten Karawang (Bapak Ahmad Juaeni dan Ibu Friskawati) memfasilitasi pertemuan antara Serikat Pekerja dan Pengusaha, dengan menghasilkan:
 - Perusahaan tidak bisa memberikan keputusan terkait tuntutan Serikat Pekerja, dan hanya menyatakan jawaban sebagaimana yang tertulis pada surat jawaban dengan nomor surat **01/HRD&GA-MGI/1/2020**.

14. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 pihak Perusahaan mengirimkan surat panggilan ke 2 (dua) kepada pekerja yang mogok kerja;
15. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 PUK SPAMK FSPMI PT. MUGAI INDONESIA mencabut surat mogok kerja dengan nomor surat: **006/PUK SPAMK-FSPMI//PT.MGI/I/2020**;
16. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 DISNAKERTRANS Kabupaten Karawang mengirimkan surat undangan Mediasi (Klarifikasi) dengan nomor surat: **565/242/HIPK** perihal masalah dispensasi;
17. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 anggota PUK SPAMK FSPMI PT. MUGAI INDONESIA yang shift 1 (satu) tidak diperbolehkan masuk ke area perusahaan. Perusahaan juga menginformasikan kepada semua pekerja yang shift 2 (dua) dan shift 3 (tiga) yang mengikuti mogok kerja pada tanggal 09,10,13,14 Januari untuk masuk ke shift 1 (satu);
18. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 10.00 semua pekerja yang mengikuti mogok kerja yang sudah datang ke perusahaan diizinkan masuk untuk melakukan absensi (*Hand Punch*) dan berkumpul di area parkir;
19. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 perusahaan melakukan pemanggilan secara parsial kepada semua pekerja yang mengikuti mogok kerja per 7 (tujuh) orang sampai dengan 9 (sembilan) orang dimulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 18.30 WIB. Total pekerja yang dipanggil adalah 70 (tujuh puluh) orang. Bagi pekerja yang dipanggil, sebelum kembali bekerja, mereka diwajibkan membuat surat pernyataan;

20. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 perusahaan melanjutkan proses pemanggilan kepada pekerja yang mengikuti mogok yang belum dipanggil pada tanggal 15 Januari 2020. Pemanggilan dimulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Total pekerja yang dipanggil adalah 56 (lima puluh enam) orang. Sama seperti sebelumnya, bagi pekerja yang dipanggil, sebelum kembali bekerja, mereka diwajibkan membuat surat pernyataan;
21. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 pada pukul 11.20 WIB, perusahaan kembali melakukan pemanggilan kepada 8 (delapan) orang pekerja yang mengikuti mogok, dan sama seperti sebelumnya, bagi pekerja yang dipanggil, sebelum kembali bekerja, mereka diwajibkan membuat surat pernyataan. Sisa pekerja yang mengikuti mogok kerja yang belum dipanggil adalah 24 (dua puluh empat) orang;
22. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 perusahaan kembali melakukan pemanggilan kepada 2 (dua) orang pekerja yang mengikuti mogok, dan sama seperti sebelumnya, bagi pekerja yang dipanggil, sebelum kembali bekerja, mereka diwajibkan membuat surat pernyataan. Sisa pekerja yang mengikuti mogok kerja yang belum dipanggil adalah 22 (dua puluh dua) orang;
23. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 perusahaan memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada 22 (dua puluh dua) pekerja yang terdiri dari 12 (dua belas) Pengurus PUK SPAMK FSPMI PT. MUGAI INDONESIA, dan 10 (sepuluh) orang anggota PUK SPAMK FSPMI PT.

MUGAI INDONESIA yang mempunyai jabatan struktural di perusahaan (leader dan asisten manajer);

24. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020, 22 (dua puluh dua) pekerja yang ter PHK secara sepihak dilarang masuk area Perusahaan. Perusahaan juga membuat pengumuman yang menerangkan bahwa 22 (dua puluh dua) pekerja tersebut tidak lagi sebagai pekerja di PT. MUGAI INDONESIA;
25. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 DISNAKERTRANS Kabupaten Karawang mengirimkan surat panggilan Mediasi dengan nomor surat: **565/403/HIPK** perihal masalah dispensasi;
26. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020, 22 (dua puluh dua) pekerja yang terPHK secara sepihak mengirimkan surat penolakan PHK kepada perusahaan melalui PT POS Indonesia;
27. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020, perusahaan mengirimkan surat permintaan berunding tentang penyelesaian PHK kepada 22 (dua puluh dua) pekerja yang terPHK;
28. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020, 22 (dua puluh dua) pekerja yang ter PHK secara sepihak tersebut mengirim surat balasan permintaan berunding dengan nomor surat: **008/PUK SPAMK-FSPMI/PT.MGI/1/2020**;

D. Alasan Perusahaan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja

Penulis juga telah melakukan wawancara kepada pihak Perusahaan melalui kuasa hukum nya. Penulis menanyakan kepada saudara Hendrawan Wibawa,

S.H., M.Hum selaku kuasa hukum perusahaan, “Dapatkah saudara jelaskan, apa yang menjadi alasan Perusahaan dalam melakukan PHK terhadap 22 (dua puluh dua) pekerja tersebut? Saudara Hendrawan Wibawa, S.H., M.Hum selaku kuasa hukum perusahaan perusahaan lantas menjawab pertanyaan penulis dengan mengatakan: “Dalam hal melakukan pemutusan kerja terhadap 22 (dua puluh dua) pekerja tersebut, perusahaan mengambil dasar hukum yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. MUGAI INDONESIA Periode 2018-2020, pasal 72 ayat (7) huruf (f) yang berbunyi:

“ Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”

Perusahaan menganggap bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh serikat pekerja adalah mogok yang tidak sah, dan mogok kerja tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan sebesar Rp. 2,695,846,000 (Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).”³

³ Hasil wawancara dengan saudara Hendrawan Wibawa, S.H., M.Hum, Kuasa Hukum PT. MUGAI INDONESIA pada tanggal 03 Agustus 2021